

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ruslan. 2021. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Rangkang Education. Tangerang.
- Asikin Zainal dkk. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group. Bandung. 252.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Maskun, 2022, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) : Suatu Pengantar*. Kencana. Jakarta.
- M. Makhfudz. 2013. *Hukum Administarasi Negara*. Graha Ilmu. Jakarta.
- Ni'matul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Pandji Santosa. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mamud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- . 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada media, Jakarta.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Indonesia*. cet. 7. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Romi Librayanto. 2022. *Ilmu Negara Telaah Kepingan Sistematika G. Jellinek. Edisi Revisi*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta.
- Soedjono Dirjosisworo. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Syahrudin Nawi. 2018. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. PT Umitoha Ukhwuah Grafika. Makassar.
- Utrecht, Moh Saleh. Djindang. 1995 *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia Cetakan Kedelapan*. Balai Buku Ichtiar. Jakarta.

Yusri Munaf. 2022. *Hukum Administasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru.

Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, 2014. *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*. Elsam. Jakarta.

Undang-Undang dan Peraturan Sejenis

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Keputusan Menteri Kominfo Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Coronavirus Disease 2019

Artikel dalam Jurnal dan Majalah Ilmiah.

Andi Muhammad Aswin Anas, Ahsan Yunus, Muhammad Athallariq Gio M, Namira Wulandari. *Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong tentang Vaksinasi*, Amanna Gappa, Vol. 29 No. 1. 2021.

Arofa, Endi., Yunus, Ahsan., Sofyan, Andi., & Borahima, Anwar. *Corporate Criminal Liability for Corruption Offences in Indonesian Criminal*

Justice System. International Journal of Advanced Research, Vol. 3, No.8. hal. 2015.

Citra Septiyani dan Grace Orlyn Sitompul, *Pengaruh Single Identity Number Terhadap Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama*, Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH) Volume 2, Number 4, April 2022.

Devita Triwiraputri Martinadhia, Muhamad Hafiyah Rusyda, Rafli Hakim Hadi Saputra, *Analisis Permasalahan Pada Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Padjadjaran Law Review Volume 9, Nomor 2, 2021.

Endah Pertiwi, Dzikra Delvina Nuraldini, Gilang Tri Buana. *Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial*. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Vol.2. No.1. 2020.

Grace Yurico Bawole, *Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability*, Lex Et Societatis Vol. VI. No. 8. Hal. 16-20. 2018.

Imam Lukito. *Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-commerce*. JIKH Vol. 11 No. 3. 2017.

Imamulhadi. *Perkembangan Prinsip Strict Liability Dan Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan*, Mimbar Hukum. Vol. 25, No. 3. 2013

Julista Mustamu. *Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Sasi Vol. 17 No. 2. 2011.

Kominfo, *Rencana Strategis 2020-2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika*

Lathifah Hanim. *Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-commerce) Di Era Globalisasi*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus. 2011.

Luthvi Febryka Nola. *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Negara Hukum: Vol. 7, No. 1. 2016.

Markus H. Simarmata, *Tantangan Penegakan HAM Korporasi*, *Majalah Hukum Nasional*, No 1. 2018.

M Rafifnafiah Hertianto. *Sistem Penegakan Hukum Terhadap Kegagalan Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia* *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 43, No. 1. 2021.

- Muhammad Fathur Procceding: *Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen (Tokopedia's Responsibility for the Leakage of Consumers Personal Data)*, Call for Paper 2 nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society. 2020.
- Muhammad Rasdy Gery Runtu, *Integrasi Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Mewujudkan Single Identity Number*, AMSIR Management Journal Volume 1 Issue 2 April 2021.
- Ni Kadek Marantina Dewi, I Nyoman Putu Budiarta, I Nyoman Subamia, *Tanggung Jawab Penyedia Layanan Kesehatan Aplikasi Pedulilindungi Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen*, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3, No. 2 – Mei 2022.
- Refaldy Braif Carundeng, Anna S. Wahongan, Presly Prayogo. *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Diretas Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*, Lex Privatum Vol. X. No. 1. 2022.
- R. N. Rudi Natamiharja dan M. Stefany. *Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Jasa Telekomunikasi PT. Telekomunikasi Selular)*, Prodigy Jurnal Perundang-undangan, Vol. 7, No.2. 2019.
- Rony Mart Panjaitan. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Terjadinya Kebocoran Data Pengguna Sistem Elektronik*, Jurnal Hukum Adigama Vol. 4 No. 2. 2021.
- Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, & Ratna Lutfitasari. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2 No 1. 2020.
- Sinta Dewi. *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia*, Yustisia. Vol.5 No.1 Januari. 2016.

Website/Internet

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual>. diakses pada 10 Oktober 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210905085011-185-689866/pakar-kritisi-kebocoran-data-sertifikat-vaksin-pedulilindungi>. diakses pada 10 Oktober 2022.

<https://bisnis.tempo.co/read/1631772/pakar-pastikan-nik-milik-105-juta-penduduk-yang-datanya-bocor-valid> diakses pada 10 Oktober 2022.

<https://www.jawapos.com/oto-dan-teknologi/08/09/2022/pakar-kemungkinan-besar-data-sim-card-yang-bocor-valid-dan-otentik/> diakses pada 10 Oktober 2022.

<https://www.suara.com/news/2022/09/07/195015/disebut-bertanggung-jawab-soal-data-sim-card-bocor-menkominfo-tak-merasa-serangan-siber-domain-bssn> diakses pada 10 Oktober 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/bpkn-soroti-maraknya-kebocoran-data-konsumen-e-commerce-dan-fintech-lt5fa8c7bc1441b/> diakses pada 10 Oktober 2022.

<https://www.jawapos.com/nasional/10/09/2022/pemerintah-diminta-tak-lempar-tanggung-jawab-soal-kebocoran-data/> diakses pada 10 Oktober 2022.

<https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/kominfo-tangani-dugaan-kebocoran-data-aplikasi-eHAC/> diakses pada 10 Oktober 2022.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58393345> diakses pada 10 Oktober 2022.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210831112006-37-272525/heboh-data-aplikasi-eHAC-bocor-ini-penjelasan-Kemenkes> diakses pada 10 Oktober 2022.

<https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/ada-dugaan-data-bocor-pemerintah-himbau-masyarakat-beralih-ke-eHAC-pedulilindungi/> diakses pada 10 Oktober 2022.

<https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/menkominfo-tidak-ada-kebocoran-data-pada-aplikasi-eHAC-dan-pedulilindungi/> diakses pada 10 Oktober 2022.

<https://indonesiabaik.id/videografis/pemerintah-tegaskan-aplikasi-pedulilindungi-aman> diakses pada 10 Oktober 2022

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--menumbuhkan-partisipasi-masyarakat-dalam-pengawasan-pelayanan-publik> diakses pada 4 Juni 2023

<http://himakom.student.uny.ac.id/perlindungan-data-pribadi-di-era-digital/> diakses pada 5 Juni 2023

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221118094030-192-875395/bssn-soal-kebocoran-data-diduga-pedulilindungi-kami-masih-koordinasi> diakses pada 25 Mei 2023

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/data-aplikasi-pedulilindungi-diduga-bocor--ini-langkah-yang-bisa-dilakukan-lt616e85b3814ac/> diakses pada 11 Juni 2023

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022> diakses pada 15 Juni 2023

<https://dataindonesia.id/digital/detail/transaksi-ecommerce-ditaksir-capai-rp530-triliun-pada-2022> diakses pada 15 Juni 2023

<https://www.liputan6.com/tekno/read/5126589/pakar-data-pedulilindungi-yang-bocor-dan-dijual-bjorka-valid-pemerintah-harus-lakukan-digital-forensic> diakses pada 11 Juni 2023

Laporan dan Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2001. Edisi 3. Departemen Pendidikan Nasional dan PT. Balai Pustaka, Jakarta.

Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019,. Hasil Penelitian Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital.